



# PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA

Fahri<sup>1)</sup>, Muhammad Irwan Padli Nasution<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [mhdfahrii567@gmail.com](mailto:mhdfahrii567@gmail.com)

<sup>2)</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [irwannst@uinsu.ac.id](mailto:irwannst@uinsu.ac.id)

## Abstract

In the current digital era, village governments in Indonesia are faced with challenges to improve transparency and accountability in managing resources and delivering public services. Village Management Information Systems (Village MIS) have emerged as important instruments to support these objectives. This study aims to analyze the role of Village MIS in strengthening transparency and accountability in village governance, with a focus on how these systems facilitate data management, communication, and better decision-making processes. Using a descriptive qualitative approach, this study collects data through a literature review of various relevant sources, including academic journals, books, and government regulations. The results indicate that Village MIS plays a significant role in enhancing transparency by providing information that is easily accessible to the public, as well as strengthening accountability by enabling accurate reporting and monitoring of village government activities. However, the implementation of Village MIS still faces several challenges, such as limited technological infrastructure, insufficient human resource skills, and resistance from village officials. This study recommends strengthening the capacity of village apparatus through training programs and investments in information technology to optimize the role of Village MIS. Overall, Village MIS functions not only as a technical tool but also as a means to build public trust in village governance, thereby supporting the achievement of good governance at the village level..

**Keywords:** Village Management Information System, Transparency, Accountability, Village Government, Good Governance.

## Abstrak

Dalam era digital saat ini, pemerintahan desa di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Sistem Informasi Manajemen (SIM) desa muncul sebagai instrumen penting untuk mendukung tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SIM desa dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, dengan fokus pada bagaimana SIM dapat memfasilitasi pengelolaan data, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur dari berbagai sumber terkait, termasuk jurnal, buku, dan regulasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM desa berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dengan memungkinkan pelaporan dan monitoring yang akurat terhadap kegiatan pemerintahan desa. Namun, implementasi SIM desa masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan resistensi dari aparatur desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan investasi dalam teknologi informasi untuk mengoptimalkan peran SIM desa. Secara keseluruhan, SIM desa tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, sehingga mendukung tercapainya good governance di tingkat desa.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Manajemen Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, Good Governance.



## PENDAHULUAN

Sebagai mahasiswa yang sedang belajar tentang administrasi publik, saya sering merenungkan bagaimana pemerintahan desa di Indonesia bisa lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik. Namun, tantangan seperti korupsi, ketidaktransparan, dan kurangnya akuntabilitas sering kali menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Di sinilah peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) desa menjadi sangat penting. SIM desa bukan hanya sekadar alat untuk mengelola data, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Transparansi dalam konteks pemerintahan desa berarti masyarakat harus mudah mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan, program pembangunan, dan kegiatan lainnya.

Sementara akuntabilitas menuntut agar aparatur desa dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan menurun, yang pada akhirnya dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini saya lakukan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana SIM desa dapat berperan sebagai instrumen penguatan kedua aspek tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran SIM desa dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Secara spesifik, saya ingin mengetahui bagaimana SIM desa memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat,

mendukung proses pengambilan keputusan yang akuntabel, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang administrasi publik, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan penggunaan SIM. Dalam konteks Indonesia, pemerintahan desa sering kali dihadapkan pada masalah seperti pengelolaan dana desa yang tidak transparan, yang sering dilaporkan oleh media. Misalnya, kasus korupsi di beberapa desa yang melibatkan penggelapan dana pembangunan.

Dengan adanya SIM desa, diharapkan masalah tersebut dapat diminimalisir. SIM desa dapat diintegrasikan dengan aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang memungkinkan pelaporan real-time dan akses publik terhadap data keuangan desa. Penelitian ini relevan karena di era digital saat ini, teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Banyak desa di Indonesia sudah mulai mengadopsi SIM, tetapi masih ada yang belum optimal. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, saya merasa perlu untuk mengangkat isu ini agar lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya SIM desa. Struktur artikel ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, mulai dari tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan, agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran saya dengan mudah.

## TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya perlu menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini saya ambil dari berbagai referensi yang saya pelajari, seperti jurnal tentang SIM, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.



Pertama, Sistem Informasi Manajemen (SIM) secara umum didefinisikan sebagai sistem yang mengintegrasikan manusia, teknologi, dan prosedur untuk mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Hartono, 2013).

Dalam konteks desa, SIM desa adalah aplikasi atau sistem yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola data administrasi, keuangan, dan pelayanan publik. Menurut Sutabri (2005), SIM melibatkan komponen seperti manusia (aparatur desa), teknologi (perangkat keras dan lunak), dan prosedur (aturan pengelolaan data). SIM desa tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan data, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa. Selanjutnya, transparansi dalam pemerintahan desa merujuk pada keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurut Kristianten (2006), transparansi dapat diukur dari kemudahan akses dokumen, kejelasan informasi, dan keterbukaan proses.

Dalam konteks desa, transparansi berarti masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana dana desa digunakan, program apa yang dijalankan, dan hasilnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, termasuk dari pemerintah desa. Akuntabilitas, di sisi lain, adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada pihak yang berkepentingan (Halim, 2012). Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa, pelaksanaan program, dan hasilnya. Menurut Polidano (2008), akuntabilitas memiliki tiga elemen utama:

akuntabilitas peran, kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan, dan peninjauan retrospektif.

Di desa, akuntabilitas dapat diperkuat melalui laporan berkala dan mekanisme pengaduan Masyarakat Peran SIM desa dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas telah dibahas dalam beberapa penelitian. Misalnya, dalam artikel "Sistem Informasi Manajemen sebagai Sarana Pencapaian E-Government" (Bani Ilham Alhadi, 2022), SIM dianggap sebagai alat untuk mendukung good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas. SIM memungkinkan distribusi informasi yang cepat dan akurat, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, dalam konteks desa, SIM dapat diintegrasikan dengan e-government untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi SIM desa juga perlu diperhatikan. Menurut hasil penelitian di Desa Kalidawir (Tryara Yulia Banobe & Lailul Musryiday, 2023), hambatan seperti resistensi birokrasi, kurangnya kemampuan teknis aparatur desa, dan kondisi sosio-kultural dapat menghambat penerapan SIM. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan tersebut. Secara teoritis, SIM desa berperan sebagai instrumen karena dapat menyediakan platform untuk berbagi informasi, memantau kegiatan, dan mempertanggungjawabkan hasil. Dengan SIM, pemerintah desa dapat membuat laporan transparan, seperti APB Desa, yang dapat diakses masyarakat melalui website desa atau aplikasi mobile.

Ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, consensus orientation, equity, effectiveness, efficiency, accountability, dan strategic vision (UNDP, 1997). Dalam penelitian ini, saya menggunakan kerangka



teori good governance sebagai dasar analisis. Good governance mencakup transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama. SIM desa dianggap sebagai alat untuk mewujudkan pilar-pilar tersebut. Referensi dari berbagai sumber, seperti jurnal tentang SIM dan tata kelola desa, mendukung argumen bahwa SIM dapat memperkuat pemerintahan desa.

## METODOLOGI PENELITIAN

Sebagai mahasiswa yang sedang belajar metodologi penelitian, saya memilih pendekatan kualitatif deskriptif untuk penelitian ini. Pendekatan ini cocok karena tujuan saya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran SIM desa secara mendalam, bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis secara kuantitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan saya untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik, dengan fokus pada pemahaman konteks dan makna di balik data. Sumber data utama saya adalah data sekunder dari literatur yang tersedia, seperti jurnal, buku, dan regulasi pemerintah terkait SIM, transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan desa. Saya mengumpulkan data dari referensi yang diberikan, termasuk artikel tentang SIM sebagai sarana e-government, tata kelola desa, dan studi kasus di beberapa desa. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah studi dokumentasi, di mana saya menganalisis dokumen-dokumen tersebut untuk menemukan pola, tema, dan insight terkait peran SIM desa.

Untuk menganalisis data, saya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pertama, saya melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan judul penelitian. Kemudian, saya mengorganisir data ke dalam kategori seperti definisi SIM, manfaat untuk transparansi, peran dalam akuntabilitas, dan tantangan

implementasi. Selanjutnya, saya melakukan interpretasi data untuk menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data saya juga melalui triangulasi sumber, di mana saya membandingkan informasi dari berbagai referensi untuk memastikan konsistensi. Sebagai mahasiswa, saya menyadari keterbatasan penelitian ini karena hanya mengandalkan data sekunder, sehingga tidak ada pengumpulan data primer di lapangan. Namun, ini cukup untuk tujuan eksploratif penelitian ini. Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan, dimulai dari pengumpulan literatur hingga penyusunan laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap referensi yang saya pelajari, saya menemukan bahwa SIM desa memiliki peran penting dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Mari saya jelaskan hasil dan pembahasannya secara detail. Pertama, peran SIM desa dalam penguatan transparansi. Transparansi adalah aspek kunci dalam good governance, di mana masyarakat harus dapat mengakses informasi dengan mudah. Dari referensi "Sistem Informasi Manajemen sebagai Sarana Pencapaian E-Government" (Bani Ilham Alhadi, 2022),

SIM memungkinkan distribusi informasi yang cepat dan akurat. Di desa, SIM dapat digunakan untuk mempublikasikan data keuangan, program pembangunan, dan hasil kegiatan melalui website atau aplikasi. Misalnya, dalam artikel tentang tata kelola desa di Kalidawir (Tryara Yulia Banobe & Lailul Musryidah, 2023), transparansi ditingkatkan melalui penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya pelayanan. SIM desa memfasilitasi ini dengan menyediakan platform digital yang



mudah diakses masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kedua, peran SIM desa dalam penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Menurut referensi tentang konsep SIM

(Safira Armah & Rayyan Firdaus, 2024), SIM membantu dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Di desa, ini berarti SIM dapat digunakan untuk melacak penggunaan dana desa, memantau pelaksanaan program, dan menghasilkan laporan yang dapat diverifikasi. Dalam studi kasus pelayanan E-KTP (Muhammad Fikri Haikal & Deasy Mauliana, 2022),

akuntabilitas diperkuat melalui sistem informasi yang memungkinkan monitoring hasil kegiatan. SIM desa memungkinkan aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan keputusan mereka secara real-time, yang pada akhirnya membangun kepercayaan masyarakat. Namun, dalam pembahasan ini, saya juga menemukan tantangan dalam implementasi SIM desa. Dari referensi tentang tata kelola administrasi desa (Dhia Nabilah & Syapril Abdullah, 2024), hambatan seperti resistensi birokrasi dan kurangnya

kemampuan teknis aparatur desa dapat menghambat penerapan SIM. Selain itu, kondisi sosio-kultural di desa, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, juga menjadi kendala. Meskipun demikian, dengan pelatihan dan dukungan teknologi, SIM desa dapat dioptimalkan. Secara keseluruhan, SIM desa berperan sebagai instrumen yang menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat, memastikan bahwa informasi mengalir dengan lancar dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan

transparansi dan akuntabilitas. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa penelitian ini membuka mata saya tentang pentingnya teknologi dalam pemerintahan desa, dan saya berharap temuan ini dapat mendorong inovasi di tingkat desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap referensi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) desa memiliki peran signifikan sebagai instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. SIM desa memfasilitasi akses informasi yang mudah bagi masyarakat, memungkinkan pengawasan publik terhadap kegiatan pemerintahan, dan mendukung proses pertanggungjawaban yang akurat melalui pelaporan digital. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan keterbukaan dan tanggung jawab. Namun, implementasi SIM desa masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan resistensi dari aparatur desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta investasi dalam teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi desa. Sebagai mahasiswa, saya merekomendasikan agar pemerintah desa lebih aktif mengadopsi SIM sebagai bagian dari strategi pembangunan desa. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus empiris di desa tertentu. Dengan demikian, SIM desa tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai pendorong tercapainya pemerintahan desa yang lebih baik dan berkeadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

Afiata, G. (2020). Makalah Sistem Informasi Manajemen:  
Researchgate.net.

Alhadi, B. I. (2022). SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN (SIM) SEBAGAI SARANA  
PENCAPAIAN E-GOVERNMENT. JURNAL  
STIE SEMARANG, 14(2), 184-195.

Armah, S., & Firdaus, R. (2024). Konsep Dan Penerapan  
Sistem Informasi Manajemen. Jurnal Inovasi  
Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital  
(JIMaKeBiDi), 1(3), 50-56.

Banobe, T. Y., & Mursyidah, L. (2023). TATA KELOLA  
PEMERINTAH DESA TERHADAP  
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DESA  
KALIDAWIR KECAMATAN TANGGULANGIN.  
Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbang, 11(3),  
323-338.

Halim, A., dkk. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi  
Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hariyanto, S. (2016). Sistem Informasi Manajemen. Jurnal  
Elektronik Universitas Tulungagung.

Hartono, B. (2013). Sistem Informasi Manajemen Berbasis  
Komputer. Jakarta: Rineka Cipta.

Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah.  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan  
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal  
Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(3), 641-656.

Ridwan, M., et al. (2021). Sistem Informasi Manajemen.  
Bandung: Widina Bhakti Persada